

**FILM BIOPIK DAN POLITIK IDENTITAS:
Kontestasi Keragaman Ideologi dalam Teks Sinema Indonesia
Pasca Rezim Soeharto**

Dwi Haryanto

Dosen Prodi S-1 Televisi dan Film, Fak.Ilmu Budaya, Universitas Jember
E-mail: dwiharyanto.sastra@unej.ac.id

ABSTRACT

*This discussion examines the textuality relationship between the historical facts of biography and the narrative structure of films that present figures who during the New Order (Orde Baru) regime were alienated from Indonesian historiography. Through a study of the films *Gie*, *Soegija*, *Sang Kiai*, *Soekarno*, and *Jenderal Soedirman*, they can deconstruct the meaning of historical films produced by the New Order regime which are dominated by Soeharto's image. The emergence of biopic films that narrate the characters with identity plurality is a deconstructive typical and reflects the antithesis of filmmakers on film products in the era of the Soeharto regime. Whereas in the New Order era, films with epic historical genre, identical to the hegemony of the military struggle which are reduced by civil society narratives, such as moslem teacher (*kiai*) and moslem student (*santri*) and other minority groups, which in the context of historical facts also contributed greatly to the era of nation formation through representation of ethnic nationalism and civic nationalism. The Indonesian discourse which is reflected in the hidden meanings of biopic films studied represents a plurality of ideologies and identity political formation in popular culture products.*

Keywords: *biopic, film, identity politics, ideology, and Indonesian cinema*

ABSTRAK

Bahasan ini mengkaji relasi tekstualitas antara fakta sejarah biografi dengan struktur naratif film-film yang menghadirkan tokoh yang selama rezim Orde Baru dialienasi dari historiografi Indonesia. Melalui kajian terhadap film *Gie*, *Soegija*, *Sang Kiai*, *Soekarno*, dan *Jenderal Soedirman* dapat mendekonstruksi makna film sejarah yang diproduksi oleh Rezim Orde Baru yang didominasi oleh image Soeharto. Kemunculan film-film biopik yang menarasikan tokoh-tokoh dengan pluralitas identitas menjadi penciri yang bersifat dekonstruktif dan merefleksikan antitesis dari para sineas terhadap produk film di era rezim Soeharto. Dimana pada era Orde Baru, film ber-*genre* epik sejarah, identik dengan hegemoni perjuangan militer yang direduksi narasi masyarakat sipil, seperti kalangan *kiai* dan *santri* maupun kelompok minoritas lainnya, yang dalam konteks fakta kebenaran sejarah juga berkontribusi besar dalam era pembentukan *nation* melalui representasi *ethnic nasionalism* dan *civic nasionalism*. Wacana ke-Indonesia-an yang tercermin dari makna-makna tersembunyi dalam film-film biopik yang dikaji merepresentasikan pluralitas ideologi dan formasi politik identitas dalam produk budaya populer.

Kata kunci: Film, biopik, politik identitas, ideologi, dan sinema Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perspektif industri kreatif perfilman
Indonesia pascakekuasaan rezim

Soeharto, ditandai oleh fenomena para
sineas (*filmmaker*) berani menghadirkan
perspektif baru dengan mengangkat tema-

tema biografi yang direpresentasikan dalam visualisasi biografi tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia. Fenomena ini merupakan fakta dekonstruktif terhadap *mainstream* film-film ber-*genre* sejarah, terutama era revolusi kemerdekaan maupun dinamika internal perjalanan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat yang bercirikan film-film heroik tokoh militer, termasuk juga peran Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru melalui film *Penumpasan Pemberontakan G 30 S/PKI* (Arifin C. Noer, 1984 diproduksi oleh PPFN), *Serangan Fajar* (Arifin C Noer, 1988, diproduksi oleh PPFN), *Janur Kuning* (Alam Rengga Surawidjaja, 1979), maupun *Enam Djam di Jogja* (Usmar Ismail, 1951 diproduksi Perusahaan Film Nasional Indonesia-PERFINI).

Era tahun 2000-an, di tengah arus utama film-film terlaris ber-*genre* komedi, roman percintaan, *horor*, *action*, maupun hasil adaptasi dari novel (ekranisasi), hadir produksi film berbasis pada biografi yang selama kekuasaan Orde Baru teralienasikan dalam historiografi (penulisan sejarah) Indonesia, terutama pada deskriptif naratif tokoh-tokoh besar Indonesia dalam konstruksi sejarah perjuangan pendirian bangsa. Tidak dapat dinafikkan bahwa antara sejarah dan film memiliki relasi logis yang sangat penting dalam membangun *mindset* publik terhadap fakta-fakta kebenaran sejarah

yang terkadang manipulatif dan hegemonik menurut perspektif penguasa. Fungsi film sebagai media indoktrinasi ideologi secara politis sangat efektif untuk membangun kesadaran publik tentang pengakuan atas fakta kebenaran sejarah penguasa, selain melalui penulisan teks-teks historiografi. Karena film tidak hanya dipandang menjadi media tontonan yang menghibur, melainkan juga berfungsi sebagai media ekspresi yang sarat dengan nilai-nilai estetis, etika, moral, dan ideologi (Ayawaila, 2013:2).

Realitas sejarah biografi merupakan sumber-sumber kreatif bagi para sineas dan pelaku industri keratif film untuk diproduksi menjadi komoditas media film (audiovisual). Dengan metode adaptasi, maka teks-teks biografi kemudian direkonstruksi sebagai media konten film, yaitu film biopik (*biography moving picture*). Oleh karena itu, era tahun 2000-an perfilman Indonesia diwarnai oleh fenomena beragam film biopik yaitu film berbasis pada deskriptif naratif tokoh (*the greats man*) (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Film-film biopik era tahun 2000-an

No.	Tahun Edar	Judul Film	Sutradara
1.	2005	<i>Gie</i>	Riri Riza
2.	2010	<i>Sang Pencerah</i>	Hanung Bramantyo
3.	2012	<i>Soegija</i>	Garin Nugroho
4.	2012	<i>Habibie & Ainun</i>	Faozan Rizal
5.	2013	<i>Sang Kiai</i>	Rako Prijanto
6.	2013	<i>Soekarno</i>	Hanung Bramantyo

7.	2014	<i>Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar</i>	Hestu Saputra
8.	2015	<i>Jenderal Soedirman</i>	Viva Westi
9.	2015	<i>Guru Bangsa: Tjokroaminoto</i>	Garin Nugroho
10.	2016	<i>Surat Cinta untuk Kartini</i>	Lukman Sardi
11.	2016	<i>Athirah</i>	Riri Reza
12.	2016	<i>RudyHabibie</i>	Hanung Bramantyo
13.	2017	<i>Kartini</i>	Hanung Bramantyo

Di antara film-film biopik tersebut terdapat keragaman dalam hal ideologi dan identitas dari masing-masing tokoh yang dihadirkan dalam film. Deskriptif naratif-sinematik atas visualisasi tokoh yang memiliki keterkaitan dengan latar belakang representasi agama dari kalangan Islam dan Katolik, nasionalis religius, sosialis nasionalisme, teknokrat, emansipasi, bahkan identitas etnis tionghoa. Artinya, pasca rezim Orde Baru ketika kebebasan berekspresi dan berkeaktivitas menemukan momentumnya maka film-film dari tokoh-tokoh yang selama ini teralienasi dari historiografi Indonesia seperti Mgr. Albertus Soegijapranata (Romo Soegija), Merry Riana, Soe Hok Gie, bahkan Soekarno yang mengalami subordinasi politik semasa Orde Baru dihadirkan dalam film oleh para sineas. Kelompok lain yang pada era Orde Baru menjadi kelompok yang termarginalkan adalah dari kelompok santri dan ulama. Bagaimana kontribusi para ulama dan santri dalam konteks sejarah kemerdekaan Indonesia mengalami

alienasi dalam historiografi Indonesia, seperti peran ulama besar Nahdlatul Ulama (NU) yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Fakta sejarah bagaimana perjuangan para ulama dan santri yang terwadahi dalam pasukan Hizbullah, laskar yang kelahirannya hasil kontribusi ulama NU termasuk K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim, dan K.H. Wahab Hasbullah, yang selama ini seakan terpinggirkan (El-Kayyis, 2015:v). Identitas dari tokoh-tokoh yang terpinggirkan dan keterwakilan kelompok minoritas dalam konstruksi sosial politik di Indonesia dihadirkan dalam industri sinematik Indonesia, seperti film *Sang Kiai* (representasi biografi K.H. Hasyim Asy'ari) dan *Soegija* (representasi biografi Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ), yang dapat diartikan sebagai artikulasi dan ekspresi politik identitas, yaitu suatu praktik politik yang dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara (Maarif dalam Fauzi dan Panggabean, 2012:4).

Film-film biopik tidak saja difungsikan sebagai representasi biografi dari tokoh yang dihadirkan melalui media audiovisual oleh sineas, melainkan dalam diri sosok tokoh tersebut melekat identitas-identitas yang membentuk suatu konstruksi dari keragaman masing-masing ideologi yang melatarbelakangi kiprah para tokoh-tokoh dalam konteks konstruksi sejarah. Artinya,

secara politis identitas mereka juga berpengaruh terhadap ideologi yang diperjuangkan, seperti dalam film *Sang Kiai* bagaimana K.H. Hasyim Asy'ari divisualisasikan secara sinematik memosisikan Islam sebagai basis perjuangan dan sikap nasionalismenya dalam konteks kebangsaan. Demikian pula dengan Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, melalui film *Soegija*, sebagai uskup pribumi pertama Indonesia juga memosisikan ideologi agama Katolik sebagai basis perjuangannya dalam bersikap terhadap konsepsi nasionalisme dan kebangsaan. Secara dekonstruktif, keberanian sineas menghadirkan film-film nasional bertema biografi dari golongan yang termarginalkan dan minoritas dalam konstruksi historiografi Indonesia, merupakan bentuk perlawanan kultural terhadap eksistensi kuasa negara terhadap film nasional era Orde Baru. Bagaimana film *Gie* dan *Merry Riana* yang secara genetik adalah kaum minoritas Tionghoa yang selama kekuasaan rezim Orde Baru selalu mengalami subordinasi juga dihadirkan dalam film biopik. Artinya, film-film biopik pascarezim Soeharto dapat dimaknai sebagai produksi makna terhadap keragaman ideologi dan representasi politik identitas, baik berdasar pada basis primordialisme agama maupun ideologi *ethnic nasionalism* dan *civic nasionalism* maupun paham sosialisme dan demokrasi yang direpresentasikan dalam teks-teks sinema.

Hakikat film merupakan produk budaya populer yang memang diorientasikan untuk kepentingan pasar (bisnis-uang) dan kebutuhan propaganda sebagai bagian dari komunikasi massa. Berlangsung suatu bentuk strategi media dengan melakukan rekayasa komodifikasi, terutama menjadikan biografi sebagai perlawanan kultural politik identitas dari tokoh-tokoh yang selama ini teralienasikan dalam historiografi Indonesia melalui konsepsi komoditas film.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tesis Ninah Arisyanti yang berjudul *Politik Identitas Tokoh Keagamaan Indonesia (KH. Ahmad Dahlan dan Mgr. Soegijapranata, SJ) dalam Film Nasional (Analisis Semiotika Media pada Film Sang Pencerah dan Film Soegija*, Program Pascasarjana Magister Media dan Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, membahas sejak kelahirannya pada abad ke-19, film telah menjadikan biografi seorang pejuang sebagai komponen tanda yang dibangun beserta tanda-tanda *history*, *cultural*, dan *political*. Film *Sang Pencerah* dan film *Soegija* merupakan respon yang tajam dari nilai-nilai *historical*, *cultural*, dan *political* dari sekian banyak tokoh pejuang nasional di Indonesia yang mengalami eksistensi identitas di sebuah kalangan tertentu di dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini tentang bagaimana politik identitas pejuang

nasional Indonesia (KH Ahmad Dahlan dan Mgr. Soegijapranata, SJ) dalam film *Sang Pencerah* dan *Soegija* dikonstruksi oleh sienas Indonesia dengan sudut pandang negara, agama, dan budaya tanpa ada campur tangan kepentingan lain. Penelitian dilakukan dengan pendekatan semiotika yang menekankan pada bagaimana tanda denotatif dan konotatif bekerja dalam sebuah pesan teks media, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dari analisa data dengan mengacu pada teori politik identitas, didapatkan kesimpulan bahwa tokoh pejuang nasional Indonesia (KH Ahmad Dahlan dan Mgr. Soegijapranata, SJ) pada film *Sang Pencerah* dan film *Soegija* bahwa para pejuang nasional dikonstruksi pada segmen cerita film *Sang Pencerah*, saat KH Ahmad Dahlan keluar dari tradisi keras Islam abangan saat itu yang kemudian beralih kepada syariat Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Hadits. Pada *scene-scene* film *Soegija*, diceritakan Romo Soegija melihat warga Belanda yang ditangkap oleh Jepang termasuk suster dan *bruder* Belanda dibawa ke interniran, Romo Soegija tidak bisa berbuat apapun kecuali menyelamatkan gereja dari rencana Jepang menjadikan gereja sebagai markas komando, dikonstruksi oleh masalah-masalah saat seorang tokoh agama harus melakukan upaya tegas demi masyarakat yang ada di negaranya demi kemanusiaan.

Tesis Septizar Tri Astika yang berjudul *Konstruksi Kepemimpinan Tokoh Bangsa dalam Film Soekarno*, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, membahas mengenai konstruksi kepemimpinan Soekarno sebagai tokoh bangsa yang dibingkai dalam film, terutama ketika Bung Karno di Ende. Film ini mengangkat fase penting dalam kehidupan Soekarno yang jarang diteliti. Penelitian ini bersandar pada teori Konstruksi Sosial-nya Peter L. Berger dan Thomas Luckman, melalui film sebagai media massa. *Framing* dipilih sebagai metode untuk mengetahui realitas yang dipilih untuk ditampilkan dalam film ini. Penggunaan analisis *framing* dari William A. Gamson dan Andre Modigliani untuk melihat bagaimana gagasan yang mengatur cara memaknai kejadian dan apa yang menjadi permasalahan dengan menggunakan perangkat *framing (framing device)* melalui *Metaphors, Catchphrases, Exemplar, Depiction*, dan *Visual Image* serta perangkat penalaran (*reasoning devices*) dengan menggunakan *roots, appeals to principle*, dan *consequences* sebagai *framing device*. Strategi *framing* tersebut digunakan untuk membentuk konstruksi yang ingin dibentuk oleh sutradara dan penulis skenario. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu media komunikasi, film memberikan konstruksi atas kepemimpinan

Soekarno sebagai pemimpin yang berjiwa bebas dan anti imperialisme, bersemangat dan *gandrung* pada persatuan, merangkul semua kalangan, dan ideologi religius. Jika ditarik pada konsep kepemimpinan, maka kepemimpinan Soekarno adalah *constellation of traits* yang demokratis, transformasional, dan menganut falsafah Pancasila.

Berbeda dengan kajian terdahulu, baik yang dilakukan oleh Arisyanti maupun Atika, dalam kajian ini lebih diarahkan pada temuan-temuan teks-teks sinema yang terdiri atas produksi makna, simbol, sikap dan perilaku, pandangan ataupun ideologi yang menjadi bagian dari identitas tokoh cerita dalam film-film biopik. Konten politik identitas yang direpresentasikan dalam keragaman ideologi dan wujud teks-teks naratif sinematik pada film biopik menjadi obyek material penelitian ini. Politik identitas dan ideologi yang menjadi bagian dari identitas tokoh cerita merupakan dekonstruksi dari perlawanan kultural tokoh-tokoh yang termarginalkan dalam historiografi Indonesia. Hal itu menjadi *trend* pascarezim Soeharto. Hal yang tidak mudah diproduksi pada masa kekuasaan Orde Baru – sangat sentralistik dan militeristik, berkonsep penyeragaman dan lebih mengutamakan kepentingan pemimpin rezim – sebagai strategi *media-scape* tentang penanaman kesadaran sejarah kepada publik, yang cenderung manipulatif dan untuk kepentingan

hegemoni kekuasaan.

3. METODE

Teknik memahami film dalam konteks kajian sinema, yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan subjektif yang bersifat tekstual-kontekstual. Pendekatan subjektif merujuk pada deskriptif dengan melakukan analisis interpretatif, yakni peneliti melakukan tafsir terhadap temuan data dari sudut fungsi dan peran kaitannya dengan unsur lain. Oleh karena itu, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Pendekatan konstruktivisme sosial dan pendekatan tekstual diarahkan untuk meneliti teks-teks dalam naratif dan visual sinematik yang terdapat dalam film-film biopik pascarezim Soeharto, khususnya di era tahun 2000-an. Artinya, produksi makna dalam konteks politik identitas dan keragaman ideologi tokoh cerita dalam film biopik yang diteliti, tercermin pada representasi teks-teks naratif maupun visual sinematik. Dengan kedua pendekatan tersebut dapat ditemukan makna-makna terkait politik identitas dan keragaman ideologi sang tokoh utama cerita (protagonis). Hal itu untuk membuktikan bahwa konten sejarah biografi, politik identitas, dan keragaman ideologi pada sang tokoh dalam film biopik sebagai wujud dari strategi produksi film. Karena objek material dalam penelitian ini adalah film biopik, dengan unsur pembentuknya fakta historis dan kisah

biografi, maka pemahaman sejarah naratif dan sejarah biografi dapat mendukung proses kajian ini. Selain itu juga, pemahaman atas sejarah naratif dan kisah biografi diperlukan karena konten teks film biopik memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh besar (*the greats man*) dalam sejarah, sehingga diperlukan upaya menselaraskan antara sejarah dan konten *plot* maupun tiap sekuennya.

Objek penelitian ini berupa teks naratif dan visual yang terdiri atas beberapa *shots* dalam tiap *sequence* film. Pemilihan didasarkan atas kategori yang termasuk dalam perspektif analisis kajian yaitu politik identitas dan keragaman ideologi sang tokoh utama cerita (protagonis). Langkah selanjutnya dilakukan teknik analisis secara interpretatif terhadap data-data yang diperoleh untuk mengungkap makna-makna tersembunyi dari teks film. Karena sarana penyampai makna yang khas pada film sebetulnya terletak dalam penataan *sequence*, bukan dalam *shot* atau *scene*, karena film pada hakikatnya adalah teks naratif yang “menyampaikan cerita” (Metz, 1974:93; Andrew, 1976:234; Budiman dkk, 2013). Film tidak bisa hanya dinilai berdasarkan anasir formal seperti penokohan, pelataran, dan pengakuan tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan ciri-cirinya sebagai seni gambar bergerak, bukan sebagai rangkaian huruf. Gambar bergerak yang ada di layar menyarankan ‘pikiran’

yang ada di balik gambar itu (Damono, 2014:143).

4. PEMBAHASAN

4.1 Film Biopik dan Historiografi Biografi: Penanda Teks Politik Identitas

Film dapat didefinisikan sebagai cerita yang dituturkan kepada penonton melalui rangkaian gambar bergerak. Cerita menjadi unsur terpenting dalam produksi film dengan *genre* apapun. Dalam cerita mengandung produksi makna-makna dan pesan-pesan tertentu yang ingin dituturkan kepada penonton melalui praktik sinematografi atau gambar bergerak. Hal tersebut berlaku pada film biopik sebagai manifestasi dari representasi politik identitas dengan keragaman ideologi sebagai konten film dari cerita tentang diri tokoh (*the greats man*) yang diceritakan atau kisah biografi. Apalagi film yang mengangkat *subject matter* tentang tokoh-tokoh negeri yang teralienasikan dalam historiografi revolusi kemerdekaan Indonesia maupun peristiwa-peristiwa sejarah tahun 1960-an karena beberapa faktor, seperti etnis, agama, maupun lawan politik. Pasca Orde Baru tumbang, tokoh-tokoh seperti Soe Hok Gie, Soekarno, Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, K.H. Hasyim Asy’ari, dan Jenderal Soedirman dihadirkan kembali oleh para sineas dalam film-film biopic baik *Gie*, *Soegija*, *Sang Kiai*, *Jenderal Soedirman*, maupun *Soekarno: Indonesia Merdeka*.

Biografi atau catatan tentang hidup seseorang itu, meskipun sangat mikro, namun menjadi bagian dalam mosaik sejarah yang lebih besar (Garraty,1957:3). Menurut Kuntowijoyo (2003:206-207) setiap biografi seharusnya mengandung empat hal, yaitu (1) kepribadian tokohnya, (2) kekuatan sosial yang mendukung, (3) lukisan sejarah zamannya, dan (4) keberuntungan dan kesempatan yang datang. *Pertama*, kepribadian sangat ditonjolkan bagi mereka yang menganut *Hero is History*, suatu konsepsi yang mempercayai sejarah adalah kumpulan biografi dan individu yang menjadi pendorong transformasi sejarah. *Kedua*, kekuatan sosial yang paling berperan bukan perorangan. *Ketiga*, melukiskan zaman yang memungkinkan seseorang muncul jauh lebih penting daripada pribadi atau kekuatan sosial yang mendukung. Pertanyaannya adalah mengapa seseorang muncul pada suatu zaman dan bukan zaman yang lain. *Keempat*, para tokoh muncul berkat adanya faktor *luck*, *coincidence* atau *change* dalam sejarah. Sehubungan dengan kepribadian tokoh, sebuah biografi perlu memperhatikan adanya latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan perkembangan diri.

Film biopik secara umum merupakan pengembangan dari *genre* drama dan epik sejarah. Film biografi menceritakan penggalan kisah nyata atau kisah hidup

seseorang tokoh berpengaruh di masa lalu maupun kini. Film biopik umumnya mengambil kisah berupa suka duka perjalanan hidup sang tokoh selama sebelum ia menjadi orang besar atau keterlibatan tokoh dalam sebuah peristiwa besar (Pratista, 2008:22). Menurut Cheshire (2015:1), "*biopics (biographical Picture) a film that depicts the life of a real person, past or present*". Film-film biopik dalam khasanah perfilman Indonesia dikategorikan sebagai dokudrama (dokumenter drama). Dokumenter drama merupakan salah satu gaya bertutur film dokumenter. Film ber-*genre* biopik merupakan bentuk dari dokudrama karena merekonstruksi peristiwa nyata yang direpresentasikan secara kreatif. Pada film dokudrama, pola kemasannya mengadaptasi pola penuturan film fiksi, yakni dengan menambahkan aspek dramatik pada alur penuturan. Film dokudrama biopik (*biografi moving picture*) lebih bebas merekonstruksi adegan masa lalu berdasarkan tafsirannya. Bentuk potret, otobiografi, biografi, rekonstruksi, investigasi merupakan tema dokudrama yang banyak diproduksi. Contohnya film dokudrama biopik tokoh sejarah seperti *Gandhi* (1982), *JFK* (1991), *Malcom X* (1992) (Ayawaila, 2008:171-175).

Menurut Marselli Sumarno (1996:23), film yang baik adalah film yang mampu merepresentasikan kenyataan sosial pada zamannya. Realitas zaman dihadirkan

dalam bentuk *plot* cerita dengan merekonstruksi teks-teks naratif dan visualisasi dalam wujud suatu film, terutama film ber-*genre* historis, baik dari sisi penokohan pelaku, periodisasi waktu berlangsungnya peristiwa, maupun peristiwa sejarah yang terjadi (Ayawaila, 2008:45). Hal ini memiliki relevansi dengan pendapat dari sejarawan Leopold van Ranke (dalam Kuntowijoyo, 2008:16), bahwa sejarah adalah apa yang sesungguhnya terjadi (*wat ist eigentlich geschite*). Ranke hanya percaya pada fakta-fakta sejarah. Hanya dengan cara itulah maka kebenaran dapat terungkap dengan jelas. Dan, pada prinsipnya sejarah itu sesuatu yang kongkret tentang manusia (pelaku), tempat (*locus*), dan waktu (periode). Film-film biopik pada era tahun 2000-an juga sangat memperhatikan fakta-fakta sejarah dengan mendasarkan pada historiografi biografi, seperti pada film *Gie*, *Sang Kiai*, *Soegija*, *Soekarno*, dan *Jenderal Soedirman*. Walaupun dalam film-film biopik tersebut hanya mengambil beberapa kisah terpenting dan menarik yang mengandung unsur dramatis dari perjalanan hidup sang tokoh untuk menjadi konten film.

Tabel 2. Relevansi struktur film biopik, historiografi biografi, dan politik identitas tokoh

Judul Film
<i>Gie</i> (Historiografi biografi Soe Hok Gie)
Struktur Isi Cerita Film
Representasi cerita Soe Hok Gie pemimpin mahasiswa di era 1960-an dari kisah-kisah yang dituliskannya di buku <i>Catatan Seorang Demonstran</i>

(CSD) menurut Riri Riza, sutradara, merupakan dokumen penting terkait isi film. Gie berani menentang dan memprotes kepemimpinan Presiden Soekarno. Di dalam film *Gie* direpresentasikan sebagai pribadi dengan karakter idealis, penulis yang memiliki kedisiplinan dalam merangkai detail-detail sejarah, diiringi dengan kisah hidup Gie yang penuh aksi dan perenungan, cinta, dan kekecewaan.

Keterangan

- Soe Hok Gie diperankan oleh aktor Nicholas Saputra.
- Film yang menunjukkan adanya representasi politik identitas dari etnis Tionghoa yang selama kekuasaan rezim Orde Baru mengalami subordinasi politik maupun sosial dan budaya

Judul Film

Sang Kiai (Historiografi biografi K.H. Hasyim Asy'ari)

Struktur Isi Cerita Film

Representasi cerita mengenai kisah perjuangan dari K.H. Hasyim Asy'ari pemimpin Pondok Pesantren Tebu Ireng sekaligus pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada masa tahun 1940-an. Bagaimana idealisme yang kukuh dan pribadi kiai yang tidak saja kukuh dalam memegang konsepsi ajaran agama, melainkan bagaimana dengan keyakinan agama yang dianutnya memberikan dampak terhadap perjuangan dalam melawan penjajah Jepang dan Sekutu, walaupun harus mempertaruhkan jiwanya. Karena menolak Seikirie – menghormati kepada Kaisar Jepang– K.H. Hasyim Asy'ari harus ditangkap dan dipenjarakan oleh kempetai. Kiai Hasyim Asy'ari harus menerima siksaan bahkan dipindah-pindah penjara sampai 3 kali. Akhirnya, ketika tentara Dai Nippon mau bekerjasama dengan para kiai, KH Hasyim Asy'ari ditunjuk menjadi ketua Masyumi dan Shumumbu yaitu Departemen Penerangan Agama bentukan Jepang.

Keterangan

- K.H. Hasyim Asy'ari diperankan oleh aktor Ikranegara
- Film yang menunjukkan adanya representasi politik identitas kaum santri dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan RI. Dalam historiografi Indonesia di era rezim Orde Baru, peran dari kaum satri sangat terpinggirkan oleh peran militer. Bahkan film-film yang berlatar belakang cerita revolusi fisik kemerdekaan sangat identik dengan peran militer. Peran penting rakyat biasa dan kaum santri hanya menjadi unsur pelengkap cerita saja.

Judul Film

Soegija (Historiografi biografi Mgr. Albertus Soegipapranata, SJ)

Struktur Isi Cerita Film

Representasi cerita mengenai kisah dari pemimpin umat Katolik, Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ pada masa penjajahan Belanda. Kisah yang diangkat dari tulisan Romo Soegija yang kemudian dibukukan dengan judul *Soegija Catatan Harian*

<p>Seorang Pejuang Kemanusiaan. Cerita diawali ketika Soegija ditasbihkan sebagai uskup pertama pribumi oleh Vatikan menjadi pemimpin umat katolik di Vikaris Apostolik Semarang. Soegija ditasbihkan oleh Mgr. P. Willekens Vikaris Apostolik Batavia. Ketika terjadi penjajahan Jepang, Soegija mempertahankan gereja yang akan dijadikan markas tentara Jepang. Namun, Soegija gagal melindungi bruder dan suster dari Belanda yang mengalami penangkapan tentara Jepang dan diinterning. Saat terjadi peperangan 5 hari di Semarang, Soegija menginisiasi genjatan senjata dengan mempertemukan pihak tentara Indonesia, Jepang, dan Belanda agar tidak jatuh korban di kalangan warga sipil.</p>	<p>Ir. Soekarno yang mengalami peminggiran secara politik selama masa Orde Baru. Bahkan diasingkan segala bentuk ideologi, pemikiran Soekarno. Substansi film tersebut menunjukkan supremasi sipil dalam meraih kemerdekaan sebagai hal yang selama ini diingkari oleh militer dalam sejarah kemerdekaan.</p>
<p style="text-align: center;">Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soegija diperankan oleh aktor Nirwan Dewanto ▪ Film yang menunjukkan adanya representasi politik identitas dari pemimpin umat Katolik, sebagai kelompok minoritas yang memiliki kepedulian dan kontribusi dalam perjuangan melawan penjajah. Dalam historiografi Indonesia, khususnya terkait dengan kisah-kisah revolusi kemerdekaan RI, peran dari tokoh-tokoh agama Katolik juga mengalami alienasi dibandingkan dengan militer. 	<p style="text-align: center;">Judul Film</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenderal Soedirman (Historiografi biografi Panglima Besar Jenderal Soedirman)
<p style="text-align: center;">Judul Film</p> <p>Soekarno (Historiografi biografi Presiden RI Ir. Soekarno)</p>	<p style="text-align: center;">Struktur Isi Cerita Film</p> <p>Representasi perjuangan dan kepemimpinan Jenderal Soedirman tatkala Belanda menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus menyatakan penghentian genjatan senjata. Pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Simons Spoor Panglima Tentara Belanda memimpin Agresi Militer II menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi Ibukota. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Jenderal Soedirman yang sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama tujuh bulan. Dari kedalaman hutan, Jenderal Soedirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri bersama Tentara Nasionalnya yang kuat.</p>
<p style="text-align: center;">Struktur Isi Cerita Film</p> <p>Representasi yang mengisahkan perjalanan hidup Presiden I RI Ir. Soekarno dari masa kecil hingga proklamasi kemerdekaan. Pada masa remaja Soekarno <i>mondok</i> di rumah HOS Cokroaminoto di Surabaya. Disinilah dia mengenal konsepsi kesadaran kebangsaan dan belajar berpidato sebagaimana dengan HOS Cokroaminoto sebagai pimpinan Sarekat Islam. Kesadaran kebangsaan inilah yang kemudian menuntunnya mendirikan PNI. Perjuangan Soekarno pun akhirnya menempatkan dirinya ke Jakarta. Bersama dengan Bung Hatta dan Sjahrir, berusaha memperoleh kemerdekaan kepada pihak Jepang. Namun, ketika Jepang kalah peperangan dengan pihak Sekutu, maka janji kemerdekaan itu tidak berhasil diperolehnya. Pihak pemuda menghendaki Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan, namun Soekarno menanggapi dengan berhati-hati, karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah sebab Jepang masih berkuasa dan memiliki senjata. Akhirnya terjadi penculikan di Rengasdengklok oleh pihak pemuda. Tapi atas peran Ahmad Soebardjo, Soekarno dan Hatta berhasil dibawa ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan. Dan pagi harinya meski dalam kondisi sakit, Soekarno yang didampingi Bung Hatta menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenderal Soedirman diperankan oleh aktor Adipati Dolken ▪ Film yang menunjukkan adanya representasi politik identitas militer yang selama masa revolusi fisik ketika Belanda melakukan Agresi Militer II atas wilayah Yogyakarta, sementara itu selama rezim Orde Baru sangat identik dengan peran Soeharto. Bahkan dalam film tersebut tidak nampak peran sentral dari Soeharto ketika terjadi peperangan gerilya. Justru sebaliknya, peran pasukan Jenderal Soedirman sebagai sentral maupun <i>point of view</i> dari keseluruhan struktur naratif film
<p style="text-align: center;">Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soekarno diperankan oleh aktor Ario Bayu ▪ Film yang menunjukkan adanya representasi kiprah dari politik identitas nasionalisme sipil dari 	<p>Tabel 2 tersebut menunjukkan adanya relevansi formatif antara film biopik dengan disiplin ilmu sejarah yaitu aspek sejarah naratif dan sejarah biografi serta politik identitas. Sejarah naratif terkait dengan kaidah maupun cara bertutur cerita, sedangkan sejarah biografi lebih kepada subjek film yang berupa cerita perjalanan hidup seseorang. Dalam film-film biopik pasca-Orde Baru menunjukkan adanya dekonstruksi terhadap historiografi</p>

revolusi kemerdekaan dan masa-masa transisi antara Orde Lama ke Orde Baru, yang selama ini sangat mengutamakan peran dari penguasa rezim untuk melanggengkan dan memanipulasi fakta-fakta sejarah bagi kepentingan kekuasaan politik penguasa. Film-film biopik yang dihadirkan pasca jatuhnya Rezim Orde Baru dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan kultural dan politik identitas. Selama ini peran dan kontribusi dari tokoh-tokoh revolusi kemerdekaan atau pasca tragedi tahun 1965— seperti K.H. Hasyim Asy'ari, Mgr. Albertus Soegijapranata, Soekarno, Jenderal Soedirman ataupun tokoh etnis Tionghoa – yang dihadirkan dalam film biopik tatkala, tersubordinasikan oleh peran negara, teralienasi dari penulisan sejarah di masa rezim Orde Baru berkuasa.

Peristiwa-peristiwa yang tertuang dalam film biopik *Gie, Sang Kiai, Soegija, Soekarno, dan Jenderal Soedirman* benar-benar fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan etik. Film biopik tersebut dapat ditelusuri secara pustaka, termasuk tidak adanya kritik dari sejarawan atas fakta sejarah yang dihadirkan dalam film. Berbeda halnya dengan film *Janur Kuning* yang memperoleh kritikan dari sejarawan ataupun pelaku sejarah karena adanya fakta yang diingkari oleh penguasa rezim. Namun, setidaknya kelima film biopik tersebut, menunjukkan adanya

representasi politik identitas dari kalangan masyarakat yang terpinggirkan dalam historiografi revolusi kemerdekaan Indonesia, seperti politik identitas dari kaum santri, umat Katolik yang bukan mayoritas di Indonesia, etnis Tionghoa, bahkan kalangan sipil yang sejatinya memiliki andil besar dalam perjuangan kemerdekaan. Artinya, bahwa para tokoh-tokoh yang terpinggirkan tersebut sejatinya secara fakta sejarah memiliki kontribusi besar dalam berdirinya negara Indonesia.

Di dalam perspektif sejarah naratif dan sejarah biografi, film sebagai produk budaya massa memiliki hubungan dengan isi cerita, yang berdasar pada kenyataan sejarah. Kenyataan yang berupa peristiwa-peristiwa yang melibatkan ataupun dialami oleh tokoh pada masa lalu, karena dalam sejarah semua peristiwa secara persis diceritakan kapan terjadi. Hal ini yang membedakan dengan mitos (Kuntowijoyo, 2013:7). Kontribusi ilmu sejarah terhadap eksistensi film adalah penulisan sejarah atau historiografi, terutama pada aspek kronologis menjadi hal yang sangat penting (Kuntowijoyo, 2013:80). Struktur naratif dalam film *Gie, Sang Kiai, Soegija, Soekarno, dan Jenderal Soedirman* menunjukkan adanya kronologis yang logis dan berdasar pada kebenaran fakta sejarah dengan secara tegas berpegang pada konsepsi kebenaran fakta sejarah, yaitu pelaku, periode atau waktu, dan peristiwa. Hal ini disebabkan bahwa aspek

kronologis berperan penting dalam penyusunan isi cerita film. Apalagi film-film ber-*genre* sejarah biografi tokoh dalam bentuk gaya dokudrama. Penyusunan isi cerita harus berdasar pada *plot* yang bersifat kronologis yaitu rangkaian urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami sendiri secara langsung oleh sang tokoh cerita. Dan, peristiwa yang tersusun dalam alur atau *plot* tetap harus berdasar pada kebenaran fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah ini kemudian direkonstruksi ke atas layar film atau sinema dengan teknik adaptasi atau ekranisasi.

4.2. Politik Identitas dan Ideologi: Keragaman Konten Film Biopik Pasca Orde Baru

Stuart Hall (dalam Rutherford (ed), 1993:223) menyatakan bahwa identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari *sense* (rasa atau kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas. Ketika identitas diformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang di luar persamaan-persamaan tersebut, sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of differences*). Identitas kolektif adalah identitas yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang mereka bangun melalui interaksi, sesama anggotanya dan untuk kepentingan bersama atau kepentingan kelompok (Setyaningrum, 2005). Identitas kolektif ini ternyata juga

tereprsentasikan dalam film biopik tokoh yang secara kolektif membawa adanya ikatan kesadaran primordialisme yang berbasis pada etnis, agama, kesamaan *platform* ideologi politik, ataupun militer. Film *Gie* merupakan representasi dari identitas etnis Tionghoa, film *Soegija* dan *Sang Kiai* merepresentasikan identitas kolektif dari kalangan umat Katolik dan santri, film Soekarno merepresentasikan adanya ikatan *platform* ideologi politik Marhaenisme ataupun para pengidola Bung Besar, maupun identitas kolektif militer, khususnya TNI Angkatan Darat atas film *Jenderal Soedirman*. Bahkan dalam proses produksi film-film biopik tersebut juga memperoleh dukungan secara finansial dari pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh sentral dalam film biopik, seperti dukungan keuskupan Indonesia dan umat Katolik dalam pendanaan film *Soegija*, dukungan Kostrad terhadap produksi film *Jenderal Soedirman*, dukungan dari Yayasan Bung Karno dalam produksi film *Soekarno*.

Ada tiga pendekatan pembentuk identitas, yaitu: (1) primordialisme, identitas diperoleh secara alamiah turun-temurun, seperti etnis, ras, agama. (2) konstruktivisme, identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. (3) instrumentalisme, identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan

pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009:14-15). Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (*citizenship*) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah, dan lain-lain (Bagir, 2011:17). Film-film biopik memang secara substansi isi ceritanya menampilkan tokoh-tokoh dengan berlatar belakang identitas agama, etnis, daerah namun apabila ditelaah lebih dalam film biografi atas diri Soe Hok Gie, Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, K.H. Hasyim Asy'ari, Soekarno, dan Jenderal Soedirman mengandung makna penanda adanya kesamaan satu identitas yaitu keindonesiaan. Kiprah mereka dalam historiografi Indonesia menunjukkan adanya semangat dan kesadaran nasionalisme atas nilai-nilai kebangsaan, khususnya sebagai bangsa Indonesia. Identitas mereka hanya satu yaitu warga negara Indonesia. Meskipun pada masa rezim Orde Baru, secara politik identitas menjadi media efektif untuk mengkonstruksikan suatu tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi kepentingan hegemoni penguasa. Sebagai contoh, rezim Orde Baru menertibkan atribut-atribut tentang Soekarno, tokoh-tokoh NU sempat menjadi musuh politik karena bersifat kritis, adanya aturan terkait

pribumi dan non pribumi. Di dalam masyarakat yang mengalami kolonialisme yang panjang seperti Indonesia, persoalan identitas adalah persoalan yang pelik. Identitas selalu menjadi persoalan *distorted and disabling identities*. Dan, cukup jelas diketahui bahwa bangsa-bangsa yang baru di Dunia Ketiga dilahirkan di tengah pergolakan dan penolakan atas kolonialisme tersebut. Bangsa baru tersebut secara kolektif perlahan-lahan menuliskan narasinya, dokumen atau manuskrip tentang perjuangannya yang tentu menghasilkan sebetuk identitas diri (Sinaga dalam Fauzi dan Panggabean (ed), 2012:34-35).

Di dalam dinamika proses sosial dan budaya masyarakat, seringkali identitas juga membawa pengaruh besar yang menjadi dasar bagi kalkulasi pola interaksi maupun relasi kuasa. Apalagi secara struktur sosial, masyarakat mengalami disparitas sosial dan kelas-kelas sosial yang berbeda. Terdapat oposisi *binner* antara pihak berkuasa dengan pihak *subaltern* karena identitas yang melekat pada dirinya, seperti agama, etnis, penguasaan ekonomi, hingga ideologi politik. Di Indonesia, relasi kuasa hegemonik sangat kentara sekali apabila terkait dengan kelompok-kelompok minoritas, baik secara agama maupun etnis. Termasuk juga dalam konteks kesatuan komunitas kolektif. Terkadang pengaruh primordialisme begitu

mengemuka dan menimbulkan segregasi sosial. Di antaranya juga karena pengaruh intervensi negara, contohnya adalah kebijakan strategis politik rezim Orde Baru. Menurut Sudjatmiko (dalam Fauzi dan Panggabean (Ed), 2012:75) melalui sejumlah perspektif, politik identitas dalam tradisi politik Indonesia telah terkubur bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan politik Bung Karno. Politik identitas yang bertendensi ideologis (Islamisme, Sosialisme, Marhaenisme) diharamkan oleh kekuasaan otoritarian Orde Baru. Bahkan di masa Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami deideologisasi, depolitisasi, dan deorganisasi (Aditya, 2003). Konsekuensi logisnya di kemudian hari adalah berlangsungnya kesadaran politik identitas, setelah rezim militeristik tersebut berakhir setelah menerima gelombang demonstrasi pada tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Orde Reformasi. Meskipun begitu, persoalan politik identitas juga masih menjadi ancaman bagi pluralisme masyarakat di era reformasi ini.

Selain kelahiran Orde Reformasi, salah satu bukti keberhasilan reformasi adalah lahirnya film-film biopik yang menghadirkan tokoh-tokoh besar (*the greats man*) dari kalangan yang teralineasi selama kekuasaan rezim Orde Baru. Selain itu, juga menghadirkan tokoh *founding father* yang mengalami pemenuhan secara politik ataupun militer. Film-film biopik *Gie*, *Sang Kiai*, *Soegija*, *Soekarno*,

dan *Jenderal Soedirman* hadir untuk mengoreksi sekaligus mendekonstruksi produksi film-film sejarah, terutama yang bersangkutan dengan masa revolusi kemerdekaan dimana Soeharto seakan-akan yang memiliki peran yang paling sentral. Sehingga dalam film *Janur Kuning*, harus menghilangkan atau meniadakan pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX selaku penggagas utama Serang Umum 1 Maret. Sedangkan film *Gie*, yang menghadirkan tokoh Tionghoa juga merupakan bentuk dekonstruksi atas praktik pengkerdilan dan pengsubordinasian etnis Tionghoa oleh rezim Orde Baru. Apalagi Soh Hok Gie merupakan etnis Tionghoa yang sangat kritis terhadap ketidakadilan, termasuk kritis terhadap praktik kekuasaan Orde Baru. Mungkin ketika Rezim Orde Baru masih berkuasa, para sineas akan kesulitan dalam memproduksi film *Gie*, dengan tokoh sentral seorang Tionghoa.

Kehadiran film-film biopik *Gie*, *Sang Kiai*, *Soegija*, *Soekarno*, dan *Jenderal Soedirman* dapat dimaknai sebagai penanda atas hadirnya gerakan estetis dan kultural untuk menghadirkan keragaman ideologi dan politik identitas kepada publik yang selama ini mengalami dogmatisasi dan indoktrinasi sejarah menurut perspektif penguasa Orde Baru yang sarat dengan manipulasi dan menyembunyikan fakta-fakta sejarah. Di dalam studi-studi gerakan sosial, terminologi politik identitas mengacu

pada gerakan yang berusaha membela dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang tertindas karena identitas yang dimilikinya (Hiariej dalam Fauzi dan Panggabean (Ed), 2012:53).

Menurut Bagir (2011:8) bahwa politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalkan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Film-film biopik *Gie*, *Soegija*, *Sang Kiai*, *Soekarno*, dan *Jenderal Soedirman* dapat diartikan sebagai bentuk aktualisasi dari politik identitas. Perlawanan kultural melalui produk budaya populer yang menghadirkan eksistensi kolektif politik identitas dari kalangan santri, umat minoritas Katolik, etnis Tionghoa, kalangan Marhaenisme, maupun militer yang berseberangan dengan *trah* militer Jenderal Besar Soeharto. Hal ini jelas sejalan dengan kehadiran film-film biopik atas tokoh-tokoh yang selama ini termarjinalkan, khususnya dalam historiografi Indonesia masa kekuasaan Rezim Orde Baru. Melalui film-film biopik, publik pun menjadi tahu atas peran golongan santri dan agamawan Katolik dalam sejarah revolusi kemerdekaan ataupun kekritisian etnis Tionghoa dalam mengkoreksi dan melawan praktik ketidakadilan yang dilakukan oleh

penguasa. Selama ini publik mengetahui adanya *stereotype negative* dan subordinasi atas etnis Tionghoa. Dan, ternyata etnis Tionghoa pun juga memiliki andil terhadap kebaikan negeri dan berani dalam mengkoreksi penguasa yang berlaku koruptif dan tidak adil.

Sementara itu Lukmantoro (2008:2) menyatakan bahwa politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasis pada ras, etnisitas, *gender*, atau keagamaan. Kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kumpulan-kumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Aktualisasi politik identitas salah satunya adalah melalui perlawanan kultural dalam ranah kreatif budaya populer, yaitu sinema atau film Indonesia. Sebab film semasa rezim Orde Baru lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan penguasa Orde Baru ataupun bagian dari politik harmonisasi dengan kepentingan dan kebijakan rezim. Film-film nasional tidak boleh berisi kritik terhadap penguasa dan bersifat menyukseskan program-program pemerintah. Menurut Sen (2013:267) bahwa kendali negara terhadap sinema telah dilegitimasi secara historis dan terkait sangat erat dengan politik sayap-kiri, setelah tahun 1965 sinema Indonesia dengan cepat dibersihkan dari euforia pemberontakan kolektif dan menjadi ruang

mediascape Orde Baru yang paling “tertata”. Perhatian negara terhadap sinema (pada awal tahun 1970-an dan awal 1980-an), baik terkait kebijakan dan bantuan keuangan dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan sinema sebagai ruang “tertata” dan memperluas ruang “tertata” ke seluruh *mediascape*. Karena pemerintah Orde Baru sejak awal bertujuan menciptakan “suatu ‘politik ketertiban’ (*ordered politics*) untuk menjamin proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang cepat, efektif, dan efisien (Mas’oed dalam Sen, 2013:265). Orde Baru persis merepresentasikan lawan politik dari ekses-ekses revolusioner dalam pemerintah (*dis*)*Order(r)* Lama Sukarno. Suara teriakan demonstrasi massa ditertibkan menjadi kebisuan atau wicara publik (*public speech*) yang harus ditata-ulang (*reordered*) (Sen, 2013:265).

Atmosfer politik tanah air pada masa pertama kali film Indonesia diproduksi oleh anak negeri, film Indonesia terbentuk dalam tema bersama yang kental dengan berbagai pernik-pernik, retorika, harapan, impian, dan semangat di sekitar nasionalisme. Sebagai bangsa yang baru lahir, para pemimpin nasional selalu menyampaikan semangat nasionalisme dan politik (Nugroho dan Herliani, 2013:133). Bahkan film-film nasional pada awal produksi film Indonesia bertumpu pada prinsip-prinsip film nasional. Pertama-tama, bersifat nasionalis dalam ruang

lingkupnya, menceritakan perjuangan militer yang merupakan inti pembentukan Indonesia modern, melawan tidak hanya Belanda, tetapi juga ancaman persatuan bangsa, katakanlah gerakan separatis Islam dan komunisme (Barker, dalam Cheng dan Barker (ed), 2011:11-12). Film-film biopik era tahun 2000-an, tidak saja sebatas membicarakan wacana ke-Indonesia-an dan nasionalisme, melainkan juga tentang identitas-identitas kalangan santri, Tionghoa, umat minoritas Katolik, pengikut Marhaenis, dan militer. Hal ini menunjukkan adanya keragaman politik identitas dan nasionalisme pasca rezim Orde Baru. Sesuatu yang jarang sekali terjadi semasa rezim Orde Baru berkuasa.

Film biopik *Gie*, *Soegija*, *Sang Kiai*, *Soekarno*, dan *Jenderal Soedirman* dengan latar belakang yang berbeda dari identitas masing-masing tokoh dalam film namun disatukan oleh satu makna tentang nilai-nilai nasionalisme ke-Indonesia-an. Terdapat dua jenis nasionalisme berdasarkan identifikasi diri pada sub-bangsa dan negara-bangsa, yaitu *civic* dan *ethnic*. Nasionalisme atau rasa kebangsaan ini dibedakan menurut level kebangsaan. Nasionalisme etnis (*ethnic nationalism*), yaitu nasionalisme yang merupakan ikatan kebangsaan yang dibangun berdasarkan persamaan bahasa, kebudayaan, dan darah keturunan kelompok etnis tertentu. Sedangkan nasionalisme kewarganegaraan (*civic*

nasionalism) merupakan kebangsaan yang dibangun lewat adanya pengakuan dan kesetiaan pada otoritas konstitusional dan kerangka perpolitikan dalam sebuah negara, selain sejarah yang sama oleh semua kelompok bangsa-bangsa. Atau dengan kata lain, ikatan yang dibangun nasionalisme ini didasarkan atas kewarganegaraan di dalam sebuah wilayah teritorial dan batas-batas yang berlaku bagi negara-bangsa (Suseno, 2010:102). Berdasar pada struktur naratif dan konten cerita film biopik, maka konsepsi nasionalisme etnis ini terlihat dari representasi Soe Hok Gie dalam film *Gie*, sedangkan nasionalisme kewarganegaraan terepresentasikan dalam film *Soegija*, *Soekarno*, *Sang Kiai*, dan *Jenderal Soedirman* yang memperjuangkan tentang konstitusionalitas dan kedaulatan kebangsaan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, terbebas dari identitas bangsa *inlander* atau terjajah.

Film-film pada era Orde Baru dengan kekuasaan absolut di kalangan militer, konten film nasional sangat dibatasi yaitu tidak boleh menampilkan kritik terhadap penguasa ataupun wajah buruk negeri ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila tema-tema picisan yang berkulat pada kisah cinta, seksualitas, dan kekerasan belaka menjadi tumbuh subur. Tidak ada ruang untuk mengeksplorasi persoalan bangsa dan estetika seni (Nugroho dan Herlina, 2013:151). Bahkan setelah tahun 1965,

Soeharto menjalankan politik panglima dengan cara militer dan sensor diberlakukan dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk film (Nugroho dan Herlina, 2013:152). Padahal, secara historis pada masa pendudukan Jepang, orang Jepang menggunakan film sebagai propaganda mengajari orang Indonesia cara memakai film sebagai alat perjuangan (Sen, 2013:33). Film bukan saja diproduksi sebagai media tontonan yang menghibur, melainkan juga berfungsi sebagai media ekspresi yang sarat dengan nilai-nilai estetis, etika, moral, dan ideologi (Ayawaila, 2013:2). Terkait dengan politik identitas, film biopik tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ideologi dari tokoh cerita yang dikisahkan. Bagaimanapun, masing-masing tokoh memiliki identitas kolektif yang melekat pada kesadaran dirinya, seperti agama, etnis, tradisi, maupun aspek kebudayaan. Para tokoh-tokoh besar yang menjadi titik fokus film merupakan pribadi yang hidup dalam komunalitas kolektif masyarakat atau institusi formal maupun informal, seperti lingkungan institusi agama, primordialisme, bahkan etnisitas. Pada film biopik yang menghadirkan tokoh sejarah dengan *setting* masa-masa kolonialisme dan awal-awal perjuangan dalam bernegara, konsep yang paling menonjol adalah pada konsepsi ideologi, seperti Sok Hok Gie, K.H. Hasyim Asy'ari, Mgr. Albertus Sugijapranata, SJ, Soekarno, dan HOS Cokroaminoto yang kiprahnya

difilmkan menjadi film biopik.

Runtuhnya rezim Orde Baru setelah berkuasa 32 tahun telah membuka spektrum besar terhadap arus demokratisasi di Indonesia yaitu dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi dialektika kemunculan kembali politik identitas. Dalam konteks Indonesia, kehadiran politik identitas adalah antitesis dari kekuatan politik yang sentralistik dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa. Kemunculan politik identitas secara massif direpresentasikan dengan munculnya simbol dan ideologi Islam (Sudjatmiko dalam Fauzi dan Panggabean (Ed), 2012:75). Film-film biopik dengan keragaman ideologi dan politik identitas dari tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam film dapat dimaknai sebagai bentuk eksistensi dan perlawanan politik dari kalangan santri, umat Katolik, etnis Tionghoa, kaum Marhaenis, dan militer terhadap hegemoni politik kekuasaan Rezim Orde Baru.

5. SIMPULAN

Film biopik sebagai salah satu *genre* film sejarah, memiliki fungsi efektif bagi tranformasi nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh besar (*the Greats Man*) di masa lalu. Film biopik sebagai film sejarah harus berpegang teguh pada ketentuan kebenaran fakta sejarah, misalnya melalui sumber historiografi. Walaupun terkadang penulisan sejarah juga menimbulkan kontroversi atas obyektivitasnya, karena pengaruh dari penguasa. Tidak terkecuali

dalam film, yang tidak saja berfungsi sebagai media hiburan, melainkan juga bisa menjadi media propaganda, pendidikan, komunikasi, dan penanaman ideologi. Rezim Orde Baru, melalui film mencoba untuk memanfaatkan sejarah kebenaran versi penguasa untuk meneguhkan kekuasaan, meskipun terkadang ada kebenaran fakta-fakta sejarah yang diingkari. Salah satunya menonjolkan peran pribadi Soeharto dan militer sebagai pihak yang paling berpengaruh semasa revolusi kemerdekaan melalui film *Janur Kuning*.

Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, hadir film-film biopik yang menghadirkan tokoh-tokoh yang selama Orde Baru berkuasa, teralienasikan dalam historiografi Indonesia atas peran mereka terkait dengan kontribusinya selama revolusi kemerdekaan ataupun etnis yang mengalami subordinasi politik, sosial, dan budaya, seperti Soe Hok Gie dari etnis Tionghoa. Ada juga dari kalangan santri yaitu K.H. Hasyim Asy'ari yang melahirkan fatwa Resolusi Jihad yang menjadi pematik perlawanan santri dan laskar Hizbullah dalam peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya. Selama ini, peristiwa itu dalam historiografi lebih mengarah kepada peran militer dan Bung Tomo. Kontribusi uskup pribumi pertama Indonesia sebagai pimpinan umat Katolik yaitu Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ yang berperan atas penghentian perang 5 hari di Semarang

ataupun menghadirkan Duta Besar Tahta Suci Vatikan untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Soekarno yang selama rezim Orde Baru mengalami subordinasi secara politik karena dianggap sebagai lawan politiknya, juga dihadirkan dalam film biopik selain *Jenderal Soedirman* yang perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 sedikit teralinasikan oleh peran Soeharto. Padahal ketika itu Jenderal Soedirman merupakan panglima besar TNI melawan hegemoni kolonialisme Belanda.

Film-film biopik seperti *Gie*, *Soegija*, *Sang Kiai*, *Soekarno*, dan *Jenderal Soedirman* memberikan keragaman atas eksistensi politik identitas dari perspektif agama, etnis, ataupun *platform* ideologi politik. Selain itu juga, menjadi penanda hadirnya semangat dan kesadaran *ethnic nasionalism* maupun *civic nasionalism*. Artinya, tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam film biopik merupakan tokoh-tokoh dengan keragaman identitas, namun disatukan oleh satu konsepsi wacana ke-Indonesia-an sebagai ideologi dan identitas kolektif. Film biopik pasca rezim Orde Baru memunculkan keragaman-keragaman ideologi dan politik identitas dari keterwakilan tokoh-tokoh Soe Hok Gie, Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, K.H. Hasyim Asy'ari, Soekarno, dan Jenderal Soedirman sebagai *subject matter*. Dan, menjadi alternatif bagi historiografi sejarah perfilman Indonesia, terutama setelah tumbanganya Rezim Orde Baru.

DAFTAR ACUAN

Buku:

- Astika, Septizar Tri. 2015. "Konstruksi Kepemimpinan Tokoh Bangsa dalam Film Soekarno." Tesis. Jakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Tidak dipublikasikan.
- Ayawaila, Gerzon R. 2008. *Dokumenter Dari Ide sampai Produksi*. Jakarta: FFTV-IKJ Press
- Ayawaila, Bangun, Afandi, Muhlisiun, Wibawa, dan Siagian. 2013. *Penyemaian Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta: FFTV-IKJ Press.
- Budiman, Christian; Abdullah, Irwan; Simatupang, G.R. Lono. 2013. "Retorik dan Makna Ideologi Karya Instalasi dalam Film Opera Jawa Garin Nugroho." *RESITAL Jurnal Seni Pertunjukkan*. Vol. 14 No. 1 Juni 2013. Halaman 1-8.
- Damono, Sapardi Djoko. 2014. *Alih Wahana*. Jakarta: Editum.
- Haryanto, Ariel. 2015. *Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Irwansyah, Ade. 2009. *Seandainya Saya Kritikus Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka
- Marsh, David dan Stoke, Gerry. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nugroho, Garin dan Herlina, Dyna. 2013. *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*. Jakarta: FFTV-IKJ Press.
- Pratista, Himawan. 2008. *Memahami Film*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Sen, Krishna. 2013. *Sinema Indonesia Membingkai Orde Baru*. Yogyakarta: Rumah Sinema.
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar-dasar Apresiasi Film*. Jakarta: Grasindo.